

**Jaminan Kesehatan Capai Rp69,7 Miliar  
143.925 Jiwa di Kukar Terdaftar sebagai PBPU dan BP**



Sumber gambar: Kaltim Post

Sabtu, 11/01/2025

Pemenuhan pelayanan kesehatan yang merata terus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Pada 2025 ini, komitmen tersebut diperkuat dengan BPJS Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

**TENGGARONG** - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar, Ika Irawati mengatakan tahun ini anggaran JKN di Kukar diproyeksikan mencapai Rp69,7 miliar. Data per 1 Desember 2024 sudah ada 143.925 jiwa di Kukar telah terdaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja/Peserta Mandiri (BP).

Serta pertumbuhan peserta rata-rata 2.433 jiwa per bulan. Pada akhir tahun 2025 nanti, diproyeksikan jumlahnya meningkat hingga 161.925 jiwa. Untuk itu, peningkatan anggaran yang signifikan diperlukan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan. "Kami di BPJS Kesehatan bersama Pemkab Kukar terus berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan JKN yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh warga," ungkapnya, Kamis (9/1).

Lanjut Ika, nantinya anggaran ini akan diusulkan untuk dialokasikan melalui APBD Kukar. Pun nantinya dana ini akan difokuskan kepada pembiayaan kelompok PBPU dan BP yang menjadi mayoritas peserta mandiri di Kukar. "Proyeksi ini menjadi tantangan besar sekaligus peluang untuk memperkuat sistem kesehatan di Kukar. Kami optimistis dengan dukungan semua pihak layanan kesehatan yang inklusif dapat diwujudkan," jelas Ika Irawati.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono mengatakan keperluan ini akan diakomodasi oleh Pemkab Kukar. Saat ini tim APBD telah menganggarkan biaya sesuai data yang ada. Ke depan melibatkan OPD terkait bersama dunia swasta akan dilakukan sinkronisasi dan optimalisasi pendataan.

Ia pun menegaskan Pemkab Kukar berkomitmen dalam memenuhi jaminan dan pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Secara nasional, *Universal Health Coverage* (UHC) Kukar sudah mencapai target 98,18 persen melampaui target presiden pada 2024 di angka 98 persen. "Kita di Kukar juga mendapat penghargaan dari 33 provinsi dan 446 kabupaten/kota se Indonesia karena dukungan kami terhadap JKN juga tertuang di visi misi Kukar Idaman, pemenuhan pembiayaan ini pasti akan menjadi perhatian kami," tutur Sunggono. (qi/far)

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Jaminan Kesehatan Capai Rp69,7 Miliar, 143.925 Jiwa di Kukar Terdaftar sebagai PBPU dan BP, 11/01/25
2. Myedisi.com, Jaminan Kesehatan Capai Rp69,7 Miliar, 11/01/25

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 (Perpres 82/2018), jaminan kesehatan adalah jaminan berupa manfaat pemeliharaan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
2. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perpres 82/2018, setiap PBPU dan BP wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS kesehatan dengan membayar iuran.